

DAFTAR RUJUKAN

BUKU:

- Abdullah K. 2018. *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Gowa: Gunadarma Ilmu.
- Anggara, Sahya. 2012. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Daim N. 2014. *Hukum Administrasi: Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi*. Surabaya: Laksbang Justitia
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenamedia Group.
- Hikmawati. 2020. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hikmawati, Fenti. 2020. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Ishaq, 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Mangku Sudika, 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Klaten: Lakeisha.
- Marzuki, Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Maulidiah Sri, 2014. *Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Indra Prahasta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyawan, 2016. *Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Sumedang: Unpad Pers
- Mursyidah, Choiriyah. 2020. *Buku Ajar Manajemen Publik*. Sidoarjo: Umsida Pers.
- Mustanir. 2022. *Pelayanan Publik*. Pasuruan: Qiara Media
- Nurtjahjo,dkk. 2013. *Memahami Maladministrasi*. Jakarta: Ombudsman RI.
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ridwan HR, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sellang, dkk. 2019. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Cv Qiara Media

- Simanjuntak.2015. *Hukum Perdata Indonesia*.Jakarta: Prenada Media Grup.
- Suggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sugiarto, Umar Said. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Patari. 2015. *Ombudsman Dan Akuntabilitas Publik*. Makassar: De La Macca
- Yanto, Nur. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*. CV. Biena Edukasi, Lhokseumawe.
- Zainuddin, A. 2014. *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 (I)*. Sinar Grafika.

JURNAL:

- Ashiddiqy. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar. *Jolsic*, Vol 9 No.2.
- Fitriyani, Anggreni, Muthahir. (2022). Analisis Terhadap Permohonan Ganti Nama Anak Menurut Hukum Perdata. (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN-LLG). *Pasira*, Vol. 5 No.1.
- Hanim, Wulandari. (2021). Pelaksanaan Perubahan Kesalahan Penulisan Biodata Dalam Akta Kelahiran Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2023. *KIMU*, Vol. 5.
- Harjanto,Hari. (2017). Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Sosio Informa*, Vol 3.
- Idrus, dkk. (2023). Perubahan dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan. *JCS*, Vol. 2 No.5.
- Kartini. (2023). Perspektif Permohonan Perubahan Nama Orang Pada Pengadilan Negeri. *Gema Wiralodra*, Vol.14 No.1.

- Kertati Indra. (2017). Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak. *Jurnal Riptek*, Vol 2 No.2.
- Kusnandi,Wijaya. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2 No.1.
- Laraswaty. (2021). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata. *Jurnal Private Law*, Vol.1.
- Mukmin Muhammad. (2023). *Implementation of Basic Data Application of Education (Dapodik) In Data Collection of Basic Education Principal (Dapodiknas) At Sd Inpres Barru 1 Barru District Barru Regency. Jurnal Meraja*, Vol.6 No.1.
- Nurmawati, Fahlevie, Haposan. (2022). Akibat Hukum Terhadap Kutipan Akta Kelahiran Yang Tidak Tercatat Didalam Registernya Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Universitas Bung Karno*, Vol. 1 No.1.
- Remaja Gede. (2014). Makna Hukum dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1.
- Riyanda Riko. (2017). Faktor-Faktor Yang Menghambat Kinerja Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. *Jurnal Niara*, Vol. 9 No.2.
- Rudatyo, dkk. (2022). Sosialisasi Urgensi Administrasi Kependudukan Bagi Warga Menurut UU No.24 Tahun 2013. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.02 No.1.
- Satria, Ainita, Prayitno. (2021). Analisis Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Pencatatan. *Pakuan Law Review*, Vol. 07 No. 01.
- Sinuraya, dkk. (2023). Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 N0.7.
- Ticher, Apriani. (2022). Tinjauan Peradilan Perubahan Nama Dalam Hukum Perdata Dari Akta Kelahiran (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta). *Jurnal Justitia*, Vol.5 No. 02.

Wahyuningsih. (2023). Maladministrasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Jurnal Juridisch*, Vol.1 No.2.

SKRIPSI:

Diya, M. (2021). Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah. *Skripsi* (Diterbitkan) Program Studi Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Hasanah, N.A. (2020). Pertanggungjawaban Pemerintah Pencatatan Data Administrasi (Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi). *Skripsi* (Diterbitkan) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jember.

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4899)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana
Paspor

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Spesifikasi Teknis Dan
Bentuk, Serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, Dan Pemusnahan
Blangko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun
Pelajaran 2021/2022

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 Tentang Layanan
Kebanksentralan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 216)

